

GERAKAN PERLAWANAN SERIKAT BURUH DALAM SISTEM OUTSOURCING DAN SISTEM PENGUPAHAN DI PT JAPFA COMFEED SIDOARJO

Mukhammad Riza Anugra Vidi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
slanker_reza@ymail.com

M. Arif Affandi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
intermilaniacs@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk gerakan perlawanan serikat pekerja/buruh SPAI-FSPMI yang menuntut penghapusan sistem kerja *outsourcing* dianggap buruh adalah sistem perbudakan. Serta menuntut sistem pengupahan yang sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan teori Antonio Gramsci dalam teori intelektual organik dan hegemoni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan bentuk gerakan serikat buruh SPAI-FSPMI dalam menuntut sistem outsourcing dan sistem pengupahan di PT JAPFA COMFEED. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan *in-depth interview*. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini terhadap SPAI yang melakukan gerakan perlawanan didasarkan atas adanya diskriminasi dari pihak perusahaan terhadap buruh ditandai dengan sistem kerja *outsourcing* dan sistem upah rendah. Selanjutnya bentuk perlawanan yang dilakukan melalui diskusi, pendidikan tentang hukum perburuhan, selebaran, aksi demonstrasi, dan diplomasi. Terakhir adalah adanya upaya pelemahan gerakan perlawanan yang dilakukan perusahaan dengan melakukan tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian, dan berupaya melakukan PHK.

Kata Kunci: Serikat buruh dan perlawanan.

Abstract

This study examines the shape of the resistance of trade unions / labor SPAI-FSPMI who demanded the abolition of the system considered outsourcing labor is slavery system and requires an appropriate wage system provisions. This study uses the theory of Antonio Gramsci's theory of hegemony and organic intellectuals. This study used a qualitative research method. The purpose of this research is to describe the shape of the trade union movement SPAI-FSPMI in demanding systems outsourcing and wage system in PT JAPFA COMFEED. Data collection techniques using observation and in-depth interview. Data analysis techniques with a qualitative descriptive method. The results of this penelitian against SPAI a resistance movement that is based on the existence of discrimination against workers of the company is characterized by a system of outsourcing labor and low wages system. The next form of resistance that is done through discussion, education about labor law, leaflets, demonstrations, and diplomacy. Last is the effort to weaken the resistance movement of the company by taking repressive measures carried out by the police, and attempting to make layoffs.

Keywords: Trade Unions and Resistance

PENDAHULUAN

Ketika negara menganut sistem kapitalisme maka segala kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan bagi kepentingan pemodal saja. Banyak kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat. Namun kini segala kebijakan bertumpu pada mekanisme pasar (*free market*) dalam wujud demokrasi hubungan rakyat dan tatanan negara ini bernafaskan neoliberalisme. Gerakan sosial hadir dalam merespon pengaruh kapitalisme dalam wujud neoliberalisme .

Tatanan sistem kapitalisme yang semakin marak masuk di negara dunia ketiga termasuk Indonesia dalam upaya ekspansi modalnya dan pemerintah mengamini tatanan sistem ekonomi politik kapitalisme, sehingga berdampak pada kepentingan kapitalisme global di negara Indonesia. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak pada pengusaha.

Namun dalam perkembangannya, di tengah situasi yang mengakibatkan hak-hak buruh yang di rampas oleh kaum pemodal, muncul permasalahan, yaitu serikat buruh mengalami satu perpecahan, mengakibatkan kekuatan perlawanan dan perjuangan semakin melemah. Hal ini akan berdampak dalam

perjuangan kelas buruh dalam menuntut hak-haknya. Perkembangan terbaru terkait satu tatanan sistem kapitalisme yang mengalami krisis karena muncul strategi baru untuk merebut *global governance* dalam bidang ekonomi dan politik dari model kapitalisme negara/*state-led development*. Model kapitalisme menunjukkan masih adanya peran negara dalam urusan kesejahteraan rakyat melalui hak asasi manusia dan sejak saat itu kapitalisme liberal merasa menderita karena dibatasi oleh kebijakan-kebijakan negara dan akumulasi serta investasi berjalan lambat karena negara sangat proteksionis demi melindungi borjuasi nasional/kapitalisme “pribumi”, sehingga menghambat laju ekspansi kapitalisme global tersebut.

Sejak saat itu pula kapitalisme mengalami krisis sehingga memunculkan strategi dalam upaya penyembuhannya dengan semangat neoliberalisme kemudian melahirkan lembaga perdangan dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan model persaingan pasar bebas, segala sesuatu didasarkan atas pasar dan mengurangi peran negara dalam upaya liberalisasi di segala sektor. Banyaknya negara-negara yang menjadi anggota WTO merupakan awal kemenangan kapitalisme dan kebangkitannya. Golongan kapitalisme liberal sudah memegang kendali terhadap terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di negara anggota WTO dengan memperdagangkannya secara bebas dan negara anggota WTO dilarang memproteksi anggota yang tergabung. Negara-negara yang tergabung harus meratifikasi semua konvensi *trade and tariff*, termasuk investasi, hak cipta intelektual pertanian.

Sehingga dapat diasumsikan bahwa kematian peran negara dalam mengatur ekonomi politik yaitu ketika bergabung dalam anggota WTO. Setiap negara yang tergabung dalam anggota WTO harus mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang sudah di sepakati dalam agenda WTO yaitu lewat konvensi *trade and tariff*. Kekuasaan negara dalam mengatur SDA dan ekonomi politik telah tergusur oleh paham neoliberalisme melalui diskursus *good governance*.

Sesuai perkembangan kapitalisme dengan model neoliberalisme kini berdampak langsung pada rakyat yaitu dengan beberapa perampasan hak-hak rakyat yang telah diliberalisasi, privatisasi perusahaan oleh pengusaha yang didukung langsung oleh pemerintah (*government*). Banyak kebutuhan-kebutuhan rakyat yang tidak dipenuhi oleh negara termasuk hak-hak buruh dalam kesejahteraannya karena hakekat manusia adalah bekerja dan mencapai satu kesejahteraan.

Permasalahan mengenai buruh, khususnya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan yang belum bisa ditemukan ujung pangkalnya, dimana antara buruh dan pengusaha dikendalikan oleh kepentingan yang saling bertentangan. Peristiwa buruh merupakan fenomena gunung es, yaitu persoalan buruh yang terlihat hanya permukaannya saja namun faktanya akar masalahnya cukup banyak dan sangat rumit.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh buruh adalah dengan mengadakan perjanjian kerja bersama agar buruh dapat berperan

dalam menentukan syarat-syarat kerja yang akan dilakukan, sehingga pengusaha dan buruh berada dalam posisi yang seimbang untuk membuat kesepakatan mengenai syarat kerja. Semakin jauh keberpihakan negara atau pemerintahan terkait kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan semisal UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dijadikan sebagai legal hukum kelas pemodal dalam melakukan eksploitasi besar-besaran bahkan persoalan kaum buruh terkait hak-hak normatif kelas buruh,

Pengkualitan serikat buruh atau persatuan kelas buruh dalam berkontradiksi di satu tatanan sistem kapitalisme tidak akan dipungkiri kelas yang berkonflik menurut Karl Marx yaitu kelas borjuis dan kelas proletariat. Definisi kelas sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, dapat kita asumsikan bahwa terjadinya konflik merupakan dari satu tatanan atau konstruksi masyarakat lewat ekonomi, politik dan kultural. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi : a. upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah provinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi atau Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu. Dalam hal upah minimum ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kesepakatan dimaksud lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penetapan upah tersebut tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 100 yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 80 tahun 1957.

Masalah yang timbul dalam bidang pengupahan karyawan pada umumnya memiliki pengertian dan kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha, upah dapat dipandang menjadi beban karena semakin besar upah yang dibayarkan pada pekerja, semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan seseorang dipandang sebagai komponen upah. Dilain pihak karyawan dan keluarganya biasanya menganggap upah hanya sebagai

apa yang diterimanya dalam bentuk uang (*take home pay*). Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sedikit pengusaha yang secara sadar dan sukarela berusaha meningkatkan penghidupan karyawannya. Dilain pihak karyawan melalui Serikat pekerja mengundang campur tangan pemerintah selalu menuntut kenaikan upah dan perbaikan *fringe benefit*. Jika tuntunan seperti itu tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja akan mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi menggunakan teknologi yang lebih padat modal atau mendorong harga jual barang yang kemudian mendorong inflasi.

Dari pemasalahan sistem pengupahan tidak menemukan titik temu antara pengusaha dan serikat buruh, keduanya memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai sistem pengupahan tenaga kerja. Pengusaha menginginkan upah tenaga kerja yang rendah dengan pertimbangan untuk mengakumulasi modal sebesar-besarnya, di sisi lain serikat buruh menginginkan upah layak/upah yang tinggi untuk kesejahteraan buruhnya. Dari hal ini menimbulkan gejolak sosial, Terjadi protes sampai demonstrasi yang dilakukan serikat buruh mengenai sistem pengupahan. Perbedaan dari keduanya menjadi satu potensi besar dalam menimbulkan konflik sosial.

KAJIAN TEORI

Proses demokratisasi di penjuru dunia menyebabkan gerakan sosial menjaditema utama untuk dikaji karena di dalamnya terdapat *civil society* yang menjadi prasyarat demokrasi. Pemaknaan tentang gerakan sosial terdapat beberapa tipe, namun bahasan ini berfokus pada tipe gerakan sosial berdasarkan perbedaan yang sangat menonjol dalam rentangan sejarah. Gerakan sosial dibedakan menjadi dua, yakni gerakan sosial lama dan baru. Perbedaan ini dibedakan berdasar pada keadaan gerakan sosial suatu zaman dengan zaman-zaman selanjutnya. Gerakan yang muncul pada fase awal modernitas memusatkan perhatian pada kepentingan ekonomi dan pada umumnya anggotanya direkrut dari satu kelas sosial tertentu. Perkembangan zaman membuat gerakan tersebut menjadi kuno dan melahirkan gerakan-gerakan sosial baru yang memiliki ciri khasnya. Dalam beberapa dekade terakhir ketika era modernitas memasuki fase akhir menuju era *post-modern* bermunculan tipe-tipe lain dari gerakan sosial. Gerakan ini berpusat pada isu-isu baru, kepentingan baru dan medan konflik sosial baru. Gerakan ini merupakan reaksi atas serangan politik, ekonomi, teknologi dan birokrasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Isu-isu gerakan ini tidak lagi bercorak kepentingan ekonomi tetapi memberikan perhatian pada masalah kultural dari otonomi individual dan resiko baru yang tak terlihat dan mempengaruhi melalui cara yang hampir sama. Keanggotaan dari gerakan sosial baru tidak lagi hanya direkrut dari satu kelas sosial tertentu tetapi mencakup pembagian kelas tradisional. Gerakan ini juga membentuk hubungan jaringan yang luas dan relatif longgar berbeda dengan organisasi yang kaku.

Sebuah gerakan tidak bisa dilepaskan dari pola kepemimpinan yang akan menentukan bentuk-bentuk gerakannya. Gerakan sosial memiliki pola kepemimpinan tertentu dalam melakukan gerakan untuk tujuan tertentu. Arah gerakan dan bentuk-bentuk gerakan sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan yang digunakan. Hal ini juga dapat berlaku pada gerakan lingkungan dalam menjalankan perannya dan mencapai tujuan dari gerakannya. Kepemimpinan menjadi pendulum arah gerakan lingkungan melalui bentuk-bentuk gerakan yang diderivasi dari pola kepemimpinan. Gagasan kepemimpinan juga diajukan oleh Antonio Gramsci dalam melakukan gerakan sosial. Berdasarkan kritiknya terhadap pandangan Marx tentang hubungan suprastruktur dan *basic structure*, Gramsci menolak pandangan Marx bahwa *basic structure* menentukan suprastruktur. Menurut Gramsci supra strukturlah yang menentukan *basic structure*. Dari pandangan ini lahir suatu gagasan fenomenalnya yakni hegemoni. Kesadaranlah yang mampu mempengaruhi keadaan *basic structure* justru bukan sebaliknya. Gramsci memperkenalkan tradisi baru, masyarakat sipil dalam konsepnya tidak berada pada momen struktur, melainkan pada suprastruktur.

Negara adalah alat untuk menjamin kedudukan kelas atas yang fungsinya secara politik meredam usaha-usaha kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan kelas atas. Suprastruktur ideologis istilah Marx meliputi pandangan moral, filsafat, hukum, agama, estetika dan sebagainya berfungsi memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu. Penjelasan ini disebut sebagai determinisme ekonomi, bukan kesadaran yang menentukan eksistensi sosial tetapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran. Hal ini yang disangkal oleh Gramsci justru kesadaranlah yang akan menentukan eksistensi sosial. Untuk sebuah proses perubahan tidak hanya cukup melakukan perbaikan sistem perekonomian saja. Tetapi lebih dari itu, perlu juga memformulasikan tatanan sosial serta budaya masyarakat untuk membangun sebuah pemahaman terhadap struktur sosial dan tradisi yang berkembang. Basis epistemologis dari matrealisme dialektis sebenarnya harus berorientasikan pada tujuan penyadaran. Gramsci memunculkan konsep intelektual organik dan hegemoni yang merupakan usaha untuk mengatasi problematika kesadaran semu dan fetisisme yang merasuki kehidupan manusia kontemporer.

Manifestasi dari intelektual organik adalah *civil society* berdasarkan ikatan sukarela sedangkan intelektual tradisional adalah *political society* yang terbentuk dari pranata-pranata negara untuk melakukan dominasi. Dalam perbedaan ini juga terdapat persamaan antara konsep intelektual organik dan intelektual tradisional seperti memihak salah satu kelas, potensi intelektual dan aktivitas intelektualnya. Gramsci menitikberatkan pemikirannya pada konsep hegemoni, konsensus tanpa sadar yang bergerak dalam level kesadaran manusia. Kesadaran manusia menjadi poin penting dalam menyimak alur pemikiran Gramsci sebagai fondasi ontologis. Dalam konteks gerakan perlawanan dimulai dari hegemoni penguasa kepada

masyarakat dan kemudian mendapatkan sikap dalam bentuk kontra hegemoni melalui sebagai bentuk perlawanan. Penguasa memiliki kemampuan yang kuat untuk menghegemoni masyarakat sedangkan masyarakat membutuhkan kepemimpinan secara intelektual untuk melawan. Dalam pandangan Gramsci dikatakan intelektual tidak hanya sekedar status namun hal itu lebih berkaitan dengan fungsi intelektualnya. Intelektual bukan dicirikan oleh Antonio Gramsci melihat pentingnya kehendak dan tekad revolusioner itu ada dalam hati sanubari proletariat untuk menumbangkan kekuasaan kaum borjuasi yang telah merasuk dalam semua dimensi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kelompok intelektual dan partai revolusioner untuk mewujudkan sosialisme. Maka sesuatu yang amat penting sekali bahwa keberadaan kaum intelektual bukanlah di menara gading, elitis, melainkan harus menyatu dan berada di sisi kaum buruh. Demikian juga partai politik, tidak bertugas menyuntik kedalam diri kelas buruh suatu kesadaran yang benar, melainkan membuat mereka sadar akan implikasi kesadaran yang sudah mereka miliki serta segi-segi perjuangan. Hal ini semua karena terkait dengan upaya kaum buruh untuk menancapkan hegemoni kultural dan ideologis sebelum memulai perebutan kekuasaan politik.

Aktivitas berfikir intrinsik yang dimiliki oleh semua orang namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Intelektual organik memiliki kemampuan sebagai organisator politik yang menyadari identitas dari yang diwakili dan mewakili. Padahal intelektual organik mempunyai kemampuan organisator walaupun pada saat yang sama bisa menjadi seorang borjuis. Setiap anggota harus dianggap sebagai seorang intelektual, meskipun tingkat pendidikannya bukan menjadi syarat pokok. Hal yang terpenting adalah fungsi kepemimpinan dalam organisasi, yaitu fungsi pengkaderan dan intelektual. Menurutnya jika kelas pekerja ingin beranjak dari kelas bawah untuk mengambil alih kepentingan bangsa dan membangun kesadaran politik maka mereka harus menciptakan kelas intelektual organiknya. Namun, penciptaan intelektual organik berlangsung lama, sulit dan penuh dengan pertentangan dimana kesetiaan masyarakat benar-benar di uji. Konsep utama dari intelektual organik menekankan pada kefasihan berbicara, penampilan, partisipasi aktif dalam kehidupan praktis, sebagai pembangun, organisator dan memiliki semangat yang unggul secara matematis yang abstrak. Reformasi moral dan intelektual adalah bagaimana organisator tersebut mampu konsisten dengan jalan sosialisme dan untuk mencapainya harus dilakukan hegemoni. Secara epistemologis pandangan Gramsci berorientasi pada tujuan penyadaran yang menggunakan sarana utama yakni pendidikan. Intelektual berperan penting untuk menggugat jeratan ideologis. Para intelektual harus mampu membongkar kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dan mampu karena dalam pandangan Gramsci perubahan sosial bukanlah semata-mata upaya menyangkut masalah kekuatan ekonomi dan fisik, tapi juga melibatkan perebutan wilayah kebudayaan dan

ideologi: suatu upaya masyarakat bawah untuk membebaskan diri mereka dari budaya kaum borjuis dan untuk membangun nilai budaya mereka sendiri bersama-sama dengan kaum tertindas dan lapisan intelektual yang berpihak. Dalam konteks inilah bisa dikatakan bahwa supremasi intelektual merupakan prakondisi tercapainya kekuasaan politik

Bagi Gramsci proses perubahan sosial tidak semata-mata sebagai perebutan kekuasaan politik, melainkan suatu perebutan kekuasaan budaya dan ideologi. Demikian juga sebuah revolusi sosial tidak dapat dilakukan dengan sekali jadi melalui perebutan kekuasaan politik, melainkan memerlukan waktu panjang dalam suatu perang posisi (*war of position*) untuk merubah pandangan dan nilai-nilai masyarakat sipil. Jika masyarakat sipil sudah dihegemoni maka sebenarnya secara *de facto* kekuasaan itu sudah berada di tangan kelas buruh dan kepemimpinan politik bisa diambil alih secara mudah. Selain itu dalam konteks tatanan dunia sekarang ini di mana segala segi kehidupan berada di bawah hegemoni kapitalisme neoliberal dalam bentuk eksploitasi buruh sampai dengan komodifikasi dan konsumerisme, maka gagasan Gramscian tentang *a counter-hegemonic transnasional blocco storico* (blok historis atau kekuatan progresif transnasional) menjadi sangat penting.

Demikian juga konsep hegemoni Gramsci ini sangat bermanfaat dan menjadi pelajaran penting bagi para politisi partai dan intelektual. Andai Sebuah partai ingin menjadi besar dan sukses semua, maka partai tersebut harus mampu mengartikulasikan kepentingan riil masyarakatnya. Sudah menjadi tugas para intelektual untuk menjadi agen perubahan dan pembebasan sosial. Dalam rangka mematahkan hegemoni borjuasi dan merumuskan pandangan dunia baru kelas proletar, Gramsci memiliki instrumen favorit yang sangat penting, yakni "intelektual organik". Kelompok ini berperan signifikan untuk mengobarkan "perang posisi" guna mengambil alih hegemoni. "Intelektual "Organik" Siapakah profil "intelektual organik" ini? Gramsci memakai istilah "intelektual" dalam arti luas yang secara praktis ekuivalen dengan "inteligensia" atau semua kelas terdidik. Pada umumnya setiap kelas utama memproduksi lapisan intelektualnya sendiri yang bertugas mempertahankan kontinuitas budaya kelas masyarakatnya dan menyatukan mereka berdasarkan solidaritas tertentu.

Bagi Gramsci, intelektual organik adalah para intelektual yang tidak sekedar menjelaskan kehidupan sosial dari luar berdasarkan kaidah-kaidah saintifik, tapi juga memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman real yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri. Intelektual organik adalah mereka yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan kaum buruh, memihak kepada mereka dan mengungkapkan apa yang dialami dan kecenderungan-kecenderungan objektif masyarakat. Dalam upaya perubahan sosial sangat diperlukan penyusunan dan pengorganisasian suatu lapisan intelektual yang mengekspresikan pengalaman aktual masyarakat dengan

keyakinan dan bahasa terpelajar. Ini memiliki makna kaum intelektual organik akan menghadirkan suara-suara kepentingan masyarakat bawah dengan bahasa budaya tinggi sehingga pandangan dunia, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan kelas bawah meluas ke seluruh masyarakat dan menjadi bahasa universal. Bila tahap ini berhasil, maka jalan semakin lebar bagi kelas bawah untuk melakukan perubahan revolusioner, yakni merebut kekuasaan politik.

Menciptakan sejarah baru agar kebohongan tidak terulang, yang disebut Gramsci dengan blok historis. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh Gramsci adalah tentang gagasan menumbuhkan kesadaran massa untuk mengorganisasi diri. Massa harus memiliki kesadaran kritis dan perang budaya maupun ideologis. Kesadaran akan muncul di kalangan masyarakat untuk membuat kehendak kolektif yang akan menandingi kekuasaan otoriter. Kesadaran kritis dan kolektif merupakan musuh laten dari kekuasaan. Di sinilah peran intelektual organik dibutuhkan untuk melihat dan membentuk ideologi yang mampu berjalan secara linear serta mampu melakukan dan mengikuti perubahan. Pandangan Gramsci ini mencoba memadukan intelektual, hegemoni dan pemahaman filosofis dunia sosial politik yang memetakan, mengkritisi, mendobrak dan merevolusi kekuasaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif yaitu dengan tujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang timbul dimasyarakat. Memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain sementara mereka hidup dalam aliran kesadaran mereka sendiri. Schutz menyebutkan adanya *because of motif* sebelum *in order to motive* (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2004:94). Penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Japfa Comfeed Sidoarjo, terdapat Serikat buruh SPAI (Serikat Pekerja Aneka Industri)-FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dikarenakan orientasi penelitian yang dituju adalah para fungsional organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data *pertama*, observasi atau pengamatan secara langsung terhadap berbagai realitas yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena lapangan. *Kedua*, *in-depth interview* digunakan untuk menggali data sedalam-dalamnya. Kemudian mencatatnya dalam *field note* (catatan lapangan) (Bungin 2003:67). Langkah yang dilakukan *in-depth interview* antara lain dengan *getting in* adalah beradaptasi agar bisa diterima dengan baik oleh buruh PT Japfa Comfeed Sidoarjo.

Teknik analisis data yang pertama menelaah seluruh berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi. *Kedua*, menganalisis data dengan menggunakan teori yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam daftar pustaka. *Ketiga*,

peneliti akan menginterpretasikan data yang telah diolah dan diperoleh dilapangan dengan menggunakan metode *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2005: 330).

HASIL PEMBAHASAN

Gerakan perlawanan terhadap PT Japfa Comfeed di Sidoarjo adalah bentuk manifestasi dari usaha SPAI-FSPMI dalam melakukan proteksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap buruh. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah perampasan hak-hak buruh terkait status kerja yang seharusnya menjadi karyawan tetap dialihkan ke *outsourcing* dan penerapan upah di perusahaan tidak sesuai dengan keputusan bupati terkait UMK hal ini ini yang menjadi landasan dasar perlawanan SPAI. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh SPAI untuk melawan PT Japfa Comfeed ditentukan oleh cara pandangnya mengenai hubungan pengusaha dan buruh. Cara pandang dari SPAI-FSPMI ini sangat jauh berbeda dengan cara pandang dari PT Japfa Comfeed. Cara pandang yang berbeda ini melahirkan suatu dinamika dalam penetapan kebijakan di perusahaan. Dinamika ini memproyeksikan dua pandangan yang saling bertentangan. Proyeksi ini tertuang dalam gerakan perlawanan yang dilakukan SPAI dalam menuntut PT Japfa Comfeed. Upaya perlawanan dari SPAI terhadap PT Japfa Comfeed di Sidoarjo merupakan wujud pertentangan antara kedua pandangan tersebut.

Peran dan kepemimpinan SPAI-FSPMI

Peran dan kepemimpinan merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan setiap gerakan sosial. Gerakan sosial tidak bisa berjalan tanpa sebuah kepemimpinan yang berfungsi sebagai penentu arah gerakan yang dilakukan. Sebuah pola kepemimpinan akan berpengaruh pada hasil dari gerakan sosial yang dijalankan. Gerakan sosial selalu berkaitan erat dengan pola kepemimpinan tertentu karena memiliki *setting* situasi dan lawan yang berbeda. Pemilihan pola kepemimpinan yang tepat menghasilkan gerakan sosial yang terorganisir dan masif. Kepemimpinan bisa dikatakan sebagai jiwa yang mengisi sebuah gerakan sosial.

Dalam gerakan perlawanan terhadap PT Japfa Comfeed di Sidoarjo SPAI-FSPMI memiliki pola kepemimpinan tertentu untuk mendukung gerakannya. SPAI membangun gerakannya melalui proses pengkaderan secara intelektual dari SPAI dan beberapa jaringan seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Mahasiswa yang diberikan keanggota dan buruh secara umum diperusahaan Japfa di Sidoarjo. SPAI bersama jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) secara aktif dalam melakukan perlawanan terhadap perampasan hak buruh khususnya di PT Japfa Comfeed tersebut. SPAI-FSPMI lahir dari kelas sosialnya, untuk menjadi pemimpin dan wadah bagi buruh. SPAI menjadi pemimpin utama dalam perlawanan tersebut dengan berkoordinasi secara rutin dengan jaringan gerakannya. Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa SPAI-FSPMI lebih berpihak pada buruh menjadi korban penindasan pengusaha dari PT Japfa Comfeed.

Gerakan sosial buruh yang dibangun oleh SPAI sejak awal berdirinya cenderung masih berada dalam tuntutan hak-hak normatif. Memang dalam perkembangan dan kemajuan organisasi kini SPAI mulai berani *go public* dan *go politic* dengan melakukan perlawanan terhadap isu-isu rakyat (kelompok tersebut meliputi, cendekiawan, petani, kaum miskin kota) dan terlibat dalam pemilu dengan mendukung salah satu calon presiden. Tetapi dalam perjalanan gerakan buruh SPAI perlawanan yang dilakukan adalah lebih fokus kepada hak-hak normatif.

Pembentukan Wadah dan Jaringan Gerakan

Konsep utama dari intelektual organik menekan pada kefasihan berbicara, penampilan, partisipasi aktif dalam praktis, sebagai pembangun, organisator dan memiliki semangat. SPAI-FSPMI memiliki segenap komponen-komponen penting tersebut dalam gerakan perlawanan terhadap PT Japfa Comfeed di Sidoarjo. Para pemimpin SPAI-FSPMI memiliki kefasihan dalam berbicara yang diwujudkan dalam memimpin forum diskusi bagi buruh. Partisipasi aktif dari SPAI ditunjukkan dengan konsisten dalam gerakan perlawanan dari sejak awal terjadinya penindasan buruh yang dirampas hak-haknya oleh pengusaha. SPAI menjadi organisator buruh dalam gerakan perlawanan terhadap pengusaha PT Japfa Comfeed. Semua hal ini dilakukan di ranah praktis dalam gerakan. SPAI menjadi pemimpin bagi jaringan-jaringan gerakannya dalam melakukan perlawanan terhadap PT Japfa Comfeed.

LBH sebagai jaringan SPAI-FSPMI tidak hanya fokus dalam melakukan advokasi atau gugatan, namun dengan memberikan beberapa wawasan terkait hukum perburuhan terhadap anggota dan buruh secara luas. Lebih membangun sinergisitas sikap dalam menyatakan sikap perlawanan terhadap keputusan PT Japfa Comfeed. Peran LBH dalam gerakan SPAI-FSPMI sangat vital dan menjadi fasilitator yang tepat dalam mendukung aspirasi buruh terhadap pengusaha dan pemerintah. SPAI-FSPMI dan jaringan LBH berbagi peran masing-masing dalam gerakan perlawanan. Hal ini ditunjukkan dalam pembagian bentuk perlawanan yang dilakukan. SPAI mengambil peran aktif dalam perlawanan secara demonstrasi, pendidikan, pendampingan buruh secara keilmuan dengan mendokumentasikan kesalahan yang dilakukan pengusaha dan Manajemen PT Japfa Comfeed. Sedangkan LBH mengambil peran pengadvokasian dan gugatan secara hukum formal yang di komunikasikan secara aktif dengan SPAI.

Dalam pandangan Gramsci pembangunan ruang komunikasi jaringan adalah bagian dari gagasan menumbuhkan kesadaran massa untuk mengorganisasikan diri. Massa harus memiliki kesadaran kritis dan perang budaya maupun ideologis. Kesadaran akan muncul dikalangan buruh untuk membuat kehendak kolektif yang akan menandingi kekuasaan otoriter. Kesadaran kritis dan kolektif merupakan poin yang penting dalam menghadapi suatu kekuasaan menurut Gramsci. Di sinilah peran intelektual organik dibutuhkan untuk melihat dan membentuk ideologi yang mampu berjalan secara linear

serta mampu melakukan dan mengikuti perubahan. Kepemimpinan dari SPAI menekankan pada beberapa aspek yang mampu mengorganisasi buruh. Aspek pertama yakni intelektual, SPAI yang memiliki *basic* bidang keilmuan memberikan pendidikan untuk memberikan wawasan dan pemahaman bagi buruh. Aspek kedua, penyadaran bagi buruh untuk menumbuhkan kesadaran kritis untuk menyikapi perampasan hak yang dilakukan pengusaha PT Japfa Comfeed. Buruh memerlukan pendampingan dalam upaya penumbuhan kesadaran kritis terkait fenomena yang terjadi ditengah-tengah perburuhan permasalahan *outsourcing* dan upah layak dengan pembentukan jaringan gerakan. Aspek ketiga, pemahaman dari SPAI tentang konstelasi secara sosial dan politik yang memetakan, mengkritisi, mendobrak kekuasaan. Hal ini tersirat dalam perlawanan SPAI yang mampu memetakan dan mengkritisi permasalahan perburuhan yang diakibatkan oleh PT Japfa Comfeed. Semua aspek ini ada dalam konsep intelektual organik dari Gramsci, yang intelektual, hegemoni dan pemahaman filosofis dunia sosial politik yang memetakan, mengkritisi dan mendobrak kekuasaan.

Gerakan Buruh SPAI-FSPMI

SPAI-FSPMI merupakan organisasi buruh besar dan berpengaruh kuat di Indonesia dalam setiap aksinya. Pada perspektif sosiologi gerakan sosial yang dilakukan oleh SPAI ini mengandung beberapa manifestasi bentuk. Pertama, gerakan dari SPAI-FSPMI merupakan penggambaran tingkah laku secara kolektif dari para aktornya. Wujud dari tindakan kolektif ini seperti demonstrasi, pemogokan yang dilakukan dalam perlawanan terhadap perusahaan Japfa di Sidoarjo.

Perlawanan SPAI-FSPMI pada tahun 2012 sampai sekarang dalam menuntut hak-hak status kerja dan upah layak di perusahaan Japfa Comfeed. Perlawanan SPAI adalah bagaimana mengusahakan dan memperjuangkan agar perusahaan adil terhadap buruh. Ketika pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka langkah perlawanan adalah berusaha melakukan tekanan kepada pengusaha, metode aksi yang dilakukan setiap kali ada permasalahan yang terjadi soal perburuhan sebagai perwujudan ketidakpuasan pihak buruh terhadap pengusaha yang bertindak sewenang-wenang. Sehingga dalam aksi menggalang solidaritas sesama buruh untuk melakukan aksi secara kolektif. Dalam melakukan aksi di PT JAPFA COMFEED pada tahun 2012 sampai sekarang, SPAI biasanya tidak sendiri tetapi berada dalam satu kekuatan yang lebih luas yaitu koalisi. Koalisi yang dibangun untuk melakukan aksi perlawanan seperti lembaga bantuan hukum (LBH). Dinamika yang terjadi dalam aksi perlawanan SPAI biasanya ada yang memberikan sedikit kontribusi bagi buruh dan terkadang aksi yang dilakukan tidak sama sekali memberikan dampak yang cukup signifikan bagi buruh. Aksi juga ada beberapa bentuk atau metode demonstrasi dan mogok kerja.

Bentuk perlawanan yang lain yang biasa dilakukan oleh SPAI adalah melakukan diplomasi terhadap perusahaan ataupun pemerintah. Bentuk perlawanan ini biasanya dilakukan SPAI, dan untuk

mengubah setiap kebijakan perburuhan yang telah diputuskan oleh pengusaha ataupun pemerintah. Diplomasi tersebut dilakukan BIPARTIT dan TRIPARTIT untuk mencari titik temu dengan asumsi bahwa ada kesalahan yang dilakukan dalam kebijakan perburuhan yang merugikan kaum buruh.

Metode perlawanan yang dilakukan melalui diplomasi ini adalah bentuk perlawanan yang berbeda dengan yang lain, yaitu tidak seperti konsep dan aksi yang dilakukan oleh SPAI. Diplomasi ini adalah tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan didalam pihak buruh sendiri, tetapi harus menggunakan jaringan ahli hukum LBH dalam penanganan kasus perburuhan, diplomasi bersifat pada advokasi kebijakan. Tujuan utama dari melakukan diplomasi adalah bagaimana mempertahankan argumen bahwa pihak pengusaha telah melanggar hukum ketenagakerjaan dan memperkuat posisi buruh. Jalur non litigasi merupakan satu tahapan atau langkah yang dilakukan dalam perlawanan SPAI dalam menuntut hak-hak kaum buruh.

SPAI-FSPMI merupakan wujud aspirasi dari buruh sebagai wadah alat perjuangan kaum buruh dalam melawan penindasan dari pengusaha. SPAI adalah gerakan sosial buruh yang terorganisir yang terbentuk atas dasar kondisi ekonomi politik yang berdampak pada ketertindasan kaum buruh. Hal ini sesuai dari pengelolaan SPAI yang dilakukan secara iuran anggota dengan pembiayaan secara iuran untuk kebutuhan organisasi. SPAI membiayai gerakannya dengan modal sendiri tanpa *founding* dalam melakukan perjuangan kesejahteraan buruh. Setiap gerakan dari SPAI terorganisir secara sistematis dan terkoordinir dengan baik dalam perlawanan PT JAPFA COMFEED.

Dari beberapa keterangan subjek menunjukkan bahwa SPAI dikelola dengan iuran yang dilakukan secara independen. Kemandirian dalam dana secara mandiri akan dapat mendukung kesuksesan dalam gerakan. SPAI bersifat independen tanpa ada ketergantungan dari pihak lain yang membiayai. Semua dilakukan karena kesadaran sehingga tidak ada motif untuk melakukan gerakan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari setiap aksi yang telah dilakukan. Gerakan SPAI dilakukan dengan kesadaran untuk berjuang serta kolektivitas dan solidaritas yang kuat untuk melakukan perlawanan dan advokasi terhadap buruh.

Bentuk perlawanan SPAI-FSPMI dalam memperjuangkan sistem kerja dan upah terhadap PT JAPFA COMFEED memiliki bentuk. Dalam perkembangannya, SPAI telah melakukan perlawanan dalam medium yang berbeda. Intensitas yang paling tinggi adalah perlawanan yang dilakukan secara diskursus melalui aksi pemogokan kerja untuk menekan pengusaha. Dalam perlawanan ini SPAI menekankan kepada pengusaha bahwa buruh adalah aset perusahaan yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Perlawanan perlawanannya untuk menunjukkan data-data dan fakta dari lapangan mengenai diskriminasi buruh. SPAI telah melakukan demonstrasi di beberapa tempat yang

berkaitan dengan masalah PT. JAPFA COMFEED untuk melakukan perlawanan.

PENUTUP

Simpulan

Gerakan serikat pekerja/serikat buruh yang terjadi timbul karena adanya sebuah kebijakan atau pelanggaran yang dianggap merugikan bagi pekerja/buruh dan kenyataan ekonomi politik kapitalisme yang tidak berpihak dengan kepentingan pekerja/buruh. Kondisi ini akan terus menimbulkan perlawanan dari serikat buruh hingga tuntutan dari serikat pekerja/buruh dapat dipenuhi. Gerakan serikat pekerja/serikat buruh tidak hanya sebatas menghendaki terjadinya perubahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha semata, melainkan perubahan pada sistem ekonomi politik yang berpihak pada pekerja/buruh.

Sulitnya posisi serikat pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraannya tidak hanya disebabkan pada faktor internal sebuah perusahaan saja, akan tetapi adanya sistem yang menyebabkan kondisi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti yang dialami pekerja/buruh saat ini terkait sebuah sistem yang mengizinkan perusahaan menyerahkan proses produksi kepada sebuah jasa yang menyalurkan tenaga kerja, sistem ini dikenal dengan sistem *outsourcing* (alih daya). Tidak hanya itu, upah juga menjadi masalah sakral yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Pemerintah, pengusaha, pekerja/buruh tidak pernah seirama dalam membicarakan upah. Dua kasus ini yang sampai saat ini menjadi tugas bagi serikat pekerja/buruh.

Dewasa ini organisasi pekerja/buruh yang muncul merupakan indikator sebuah perubahan yang sangat besar dalam gerakan buruh. Gerakan buruh semakin berkembang saat ini dan semakin bersikap reaktif dalam melakukan perlawanan memperjuangkan kesejahteraan walaupun hasilnya yang didapat belum tentu memberikan perubahan yang signifikan bagi pekerja/buruh secara keseluruhan. Dalam hal ini SPAI-FSPMI adalah salah satu organisasi pekerja/buruh yang selalu berusaha untuk membangun gerakan pekerja/buruh yang mandiri, kuat dan berkarakter demi terciptanya kesejahteraan bagi pekerja/buruh.

Dalam pandangan Gramsci pembangunan ruang komunikasi jaringan adalah bagian dari gagasan menumbuhkan kesadaran massa untuk mengorganisasikan diri. Massa harus memiliki kesadaran kritis dan perang budaya maupun ideologis. Kesadaran akan muncul dikalangan buruh untuk membuat kehendak kolektif yang akan menandingi kekuasaan otoriter. Kesadaran kritis dan kolektif merupakan poin yang penting dalam menghadapi suatu kekuasaan menurut Gramsci. Disinilah peran intelektual organik dibutuhkan untuk melihat dan membentuk ideologi yang mampu berjalan secara linear serta mampu melakukan dan mengikuti perubahan. Kepemimpinan dari SPAI menekankan pada beberapa aspek yang mampu mengorganisasi buruh. Aspek pertama yakni intelektual, SPAI yang memiliki *basic*

bidang keilmuan memberikan pengkaderan untuk memberikan wawasan dan pemahaman bagi buruh. Aspek kedua, penyadaran bagi buruh untuk menumbuhkan kesadaran kritis untuk menyikapi perampasan hak yang dilakukan pengusaha PT Japfa Comfeed. Buruh memerlukan pendampingan dalam upaya penumbuhan kesadaran kritis terkait fenomena yang terjadi ditengah-tengah perburuhan permasalahan *outsourching* dan upah layak dengan pembentukan jaringan gerakan. Aspek ketiga, pemahaman dari SPAI tentang konstelasi secara sosial dan politik yang memetakan, mengkritisi, mendobrak kekuasaan. Hal ini tersirat dalam perlawanan SPAI yang mampu memetakan dan mengkritisi permasalahan perburuhan yang diakibatkan oleh PT. Japfa Comfeed. Semua aspek ini ada dalam konsep intelektual organik dari Gramsci yang meliputi intelektual, hegemoni, dan pemahaman filosofis dunia sosial politik yang memetakan serta mengkritisi dan mendobrak kekuasaan.

SPAI-FSPMI mempunyai peran dalam memperjuangkan agar sistem *outsourching* dapat dihapuskan dan upah layak bagi buruh. Perlawanan PT. JAPFA COMFEED menjadi bukti konsistensi SPAI dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh melalui cara-cara yang sifatnya ilmiah seperti diskusi, diplomasi, aksi demonstrasi terhadap pengusaha dan pemerintah agar tuntutan dari SPAI dapat terealisasikan serta pengawasan terhadap perusahaan terkait sistem *outsourching* dan upah pekerja. Namun langkah yang juga dilakukan oleh SPAI dalam menghadapi permasalahan perburuhan adalah menggagas konsep, data-data dilapangan untuk kemudian diberikan kepada pengusaha dan pemerintah. SPAI-FSPMI merupakan organisasi pekerja/buruh yang memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh dapat hidup sejahtera. Pada perjuangan melawan penghapusan sistem *outsourching* dan upah layak bagi buruh demi terwujudnya kesejahteraan bagi buruh.

- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
Suyanto, Bagong dkk. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, Research dan Training Center*. Malang: UMM Press.
Arifin, Syarif, dkk. 2012. *Memetakan Gerakan buruh : Antologi Tulisan Perburuhan Mengenang Fauzi Abdullah*. Depok: Kepik
Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
Fakih, Mansour. 2002. *Sosial Movement Sebagai Alternatif Terhadap Civil Society*, Wacana: Menuju Gerakan Baru. Yogyakarta: Bentang Budaya
Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Gramsci, Antonio. 2001. *Catatan-Catatan Politik*. Surabaya: Pustaka Promothea.
Moleong, Lexy.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Patria, Nezar dan Andi Arif. 1999. *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.